Jurnal Humaniora
Vol. 9, No. 1 (2025) pp. 331 - 339
http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora
p-ISSN: 2684-9275 e-ISSN: 2548-9585

Cancel Culture sebagai Sistem Autopoietik: Logika Penghukuman Sosial di Dunia Digital dalam Perspektif Niklas Luhmann

Yohana Vanessa Rebecca Simarmata, Fitzerald Kennedy Sitorus
Universitas Pelita Harapan, Jakarta Selatan, Jakarta, 12930, Indonesia.

yohanavrs07@gmail.com
https://doi.org/10.30601/humaniora.v%vi%i.6564

Published by Universitas Abulyatama

Artikel Info
Submitted:
08-03-2025
Revised:
30-03-2025
Accepted:
30-04-2025
Online first :
30-04-2025

Abstract

The cancel culture phenomenon is increasingly prevalent in the contemporary digital landscape, marked by the practice of social punishment against individuals or groups who are considered to have violated collective norms on social media. This study aims to analyze cancel culture as an autopoietic system through the perspective of Niklas Luhmann, focusing on its operationally closed characteristics and its ability to reproduce its own communication structure. The study uses a qualitative approach based on literature studies, with data sources in the form of scientific articles, books, and documentation of cancel culture cases on digital platforms. The results of the study show that cancel culture forms an independent communication system, which processes external input based on its own internal logic. In conclusion, cancel culture as an autopoietic system explains how social surveillance in the digital era has become more fragmented, emotional, and difficult to control, while challenging assumptions about justice, participation and reconciliation in public communication spaces in the digital world.
Keywords: Cancel Culture, Autopoiesis, Niklas Luhmann, Social Punishment, Digital

Abstrak

Fenomena cancel culture semakin ramai dalam lanskap digital kontemporer, ditandai oleh praktik penghukuman sosial terhadap individu atau kelompok yang dianggap melanggar norma kolektif di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cancel culture sebagai sistem autopoietik melalui perspektif Niklas Luhmann, dengan fokus pada karakteristiknya yang tertutup secara operasional dan kemampuannya dalam mereproduksi struktur komunikasinya sendiri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, dengan sumber data berupa artikel ilmiah, buku, dan dokumentasi kasus cancel culture di plaform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cancel culture membentuk sistem komunikasi independen, yang memproses input eksternal berdasarkan logika internalnya sendiri. Kesimpulannya, cancel culture sebagai sistem autopoietik menjelaskan bagaimana pengawasan sosial dalam era digital menjadi lebih terfragmentasi, emosional, dan sulit dikendalikan, sekaligus menantang asumsi tentang keadilan, partisipasi dan rekonsiliasi dalam ruang komunikasi publik di dunia digital.
Kata-kata kunci: Cancel Culture, Autopoiesis, Niklas Luhmann, Penghukuman Sosial, Digital

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Dalam era digital ini, fenomena *cancel culture* telah muncul sebagai mekanisme penghukuman sosial yang khas, menantang konsepsi tradisional tentang akuntabilitas dan keadilan sosial. *Cancel culture*, atau budaya pembatalan, merujuk pada praktik kolektif untuk menarik dukungan publik terhadap individu atau entitas yang dianggap melanggar norma-norma sosial tertentu, terutama melalui tekanan massal di platform media sosial (D. Clark, 2020). Fenomena ini tidak hanya merekonfigurasi lanskap interaksi sosial tetapi juga menciptakan sistem penghukuman yang bersifat self-referential dan otonom. Dalam pandangan teori sistem sosial Niklas Luhmann, *cancel culture* bisa dilihat sebagai sebuah sistem yang hidup dan berjalan sendiri. Sistem ini mampu bertahan dan terus berkembang karena dijalankan oleh komunikasi yang berulang-ulang di dalam dirinya sendiri, tanpa perlu bergantung langsung pada faktor dari luar (Chiou, 2020). Analisis ini penting karena memberikan kerangka teoretis untuk memahami bagaimana logika penghukuman sosial beroperasi dalam ekosistem digital yang terfragmentasi.

Perkembangan platform media sosial telah menciptakan kondisi struktural yang memungkinkan munculnya *cancel culture* sebagai fenomena global. Menurut van Dijck et al. (2018), arsitektur platform digital yang berbasis pada algoritma rekomendasi (*recommendations algorithms*), viralisasi konten (*content viralization*, dan ekonomi perhatian (*the attention economy*) telah memfasilitasi penyebaran cepat praktik penghukuman sosial ini. Karakteristik media sosial yang partisipatoris dan real-time memungkinkan mobilisasi massa dalam skala dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya(Tufekci, 2017). Namun, seperti yang diamati oleh Saint-Louis (2021), proses ini sering kali mengabaikan prinsip-prinsip proses hukum (*due process*) dan proporsionalitas, menciptakan apa yang disebut sebagai pengadilan algoritmik (*algorithmic justice*) yang lebih didorong oleh emosi kolektif daripada pertimbangan rasional (Muhammad Reza Zulfikar et al., 2023)

Teori autopoiesis Niklas Luhmann menawarkan perspektif unik untuk menganalisis fenomena ini. Konsep inti dari teori ini adalah bahwa setiap sistem merupakan entitas yang tertutup secara operasional yang berarti mereka hanya beroperasi berdasarkan logika internal dan kode biner spesifik (Mueller, 2021). Dalam konteks *cancel culture*, sistem ini beroperasi melalui kode biner "dapat diterima/tidak dapat diterima" (*acceptable/unacceptable*), di mana keputusan untuk membatalkan seseorang dibuat berdasarkan kriteria yang terus berkembang dan sering kali tidak jelas (Bouvier, 2020). Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Marwick dan Lewis (2017), dinamika ini menciptakan lingkaran umpan balik yang *self-reinforcing*, di mana

norma-norma baru terus diproduksi tanpa referensi eksternal yang stabil. Karakter autopoietik *cancel culture* semakin jelas ketika kita memeriksa bagaimana sistem ini merespons gangguan dari lingkungannya. Sebagaimana dicatat oleh Rini (2021), upaya untuk mengkritik atau mereformasi *cancel culture* sering kali justru diserap dan dinetralkan oleh sistem itu sendiri. Misalnya, dengan melabeli kritik sebagai bentuk "pertahanan bagi pelaku" atau "ketidaksadaran akan privilege". Mekanisme ini mencerminkan konsep Luhmann tentang *structural coupling*, di mana sistem hanya merespons lingkungannya dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya oleh struktur internalnya. Dengan demikian, *cancel culture* menunjukkan ketahanan yang khas dari sistem autopoietik, mampu mempertahankan integritas operasionalnya meskipun menghadapi tekanan eksternal (Ayunda Permata & Nurhadiyanto, 2024).

Implikasi dari analisis ini bersifat mendalam bagi pemahaman tentang ruang publik digital. Seperti yang diperingatkan oleh Norris (2021), ketika mekanisme penghukuman sosial menjadi semakin terpisah dari sistem hukum formal dan diskursus rasional, risiko munculnya tirani mayoritas digital menjadi nyata. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada literatur yang berkembang tentang *cancel culture* dengan menawarkan analisis sistematis berdasarkan teori sosial kontemporer, sekaligus memberikan kritik konstruktif terhadap praktik penghukuman sosial di era digital.

KAJIAN TEORI

Autopoiesis

Konsep autopoiesis yang dikembangkan oleh Niklas Luhmann merupakan adaptasi dari teori sistem biologis Humberto Maturana dan Francisco Varela ke dalam ranah sosiologi. Dalam karya monumentalnya *Social Systems*, Luhmann mendefinisikan autopoiesis sebagai kapasitas setiap sistem untuk memproduksi dan mereproduksi dirinya sendiri melalui operasi komunikasi yang tertutup secara operasional. Karakter utama sistem autopoietik menurut Luhmann adalah kemampuannya untuk membedakan diri dari lingkungan (*self-boundary maintenance*) dan menentukan elemen-elemen pembentuknya secara mandiri (*self-referentiality*). Perkembangan teori autopoiesis Luhmann mengalami tiga fase penting sebagaimana diuraikan oleh Kneer dan Nassehi dalam *Niklas Luhmann's Theory of Social Systems*. Pertama, fase awal di tahun 1980-an yang berfokus pada pembedaan sistem/lingkungan. Kedua, fase matang di tahun 1990-an dengan pengembangan konsep *operational closure*. Ketiga, fase akhir yang mempertajam analisis tentang structural coupling antar sistem. Seperti ditunjukkan oleh Moeller (2006) dalam *Luhmann*

Explained, konsep kunci autopoiesis Luhmann terletak pada pemahaman bahwa sistem sosial tidak beroperasi melalui manusia sebagai komponen, tetapi melalui komunikasi sebagai operasi dasar.

Aplikasi konsep autopoiesis pada sistem media telah dikembangkan oleh Luhmann sendiri dalam *The Reality of the Mass Media* (2021)Di sini ia menunjukkan bagaimana sistem media membangun realitasnya sendiri melalui kode biner "informasi/non-informasi", dengan logika operasional yang tidak dapat direduksi ke sistem lain seperti politik atau hukum. Analisis ini diperluas oleh Kurniawan (2022) dalam *Autopoietic Systems in the Digital Age* yang meneliti bagaimana platform media digital mengintensifkan sifat autopoietik melalui algoritma yang self-referential. Kritik terhadap konsep autopoiesis Luhmann datang dari berbagai perspektif. Habermas dalam *The Philosophical Discourse of Modernity* menilai pendekatan Luhmann mengabaikan peran aktor dalam transformasi sosial. Sementara itu, Mingers dalam *Can Social Systems be Autopoietic?* mempertanyakan analogi biologis yang terlalu kaku ketika diterapkan pada sistem sosial. Namun, seperti dijelaskan oleh Seidl dalam *Luhmann's Theory of Autopoietic Social Systems*, kekuatan konsep ini justru terletak pada kemampuannya menjelaskan kompleksitas masyarakat modern yang semakin terdiferensiasi.

Cancel Culture

Cancel culture telah menjadi fenomena dominan dalam wacana sosial-politik di era digital, memicu perdebatan intensif di kalangan akademisi, aktivis, dan praktisi media. Secara konseptual, *cancel culture* merujuk pada praktik kolektif untuk menarik dukungan atau mengisolasi individu/kelompok yang dianggap melanggar norma sosial, sering kali melalui tekanan massal di media sosial (D. Clark, 2020). Norris (2021) mendefinisikannya sebagai mekanisme penghukuman sosial yang bersifat performatif, di mana pelaku tidak hanya dikritik tetapi secara sistematis dikucilkan dari ruang publik digital. Fenomena ini berkembang pesat seiring dengan meningkatnya polarisasi politik dan budaya partisipatoris di platform seperti Twitter dan TikTok .

Studi empiris oleh Alfredo (2023) mengidentifikasi tiga karakteristik utama *cancel culture*: (1) mobilitas viral, di mana kasus tertentu dengan cepat mendapatkan perhatian massal; (2) preskriptivisme moral, di mana komunitas online menetapkan standar perilaku yang kaku; dan (3) efek chilling, di mana ancaman pembatalan membungkam ekspresi yang berisiko. Marwick dan Lewis (2017) menambahkan bahwa *cancel culture* sering kali beroperasi sebagai

bentuk pengadilan algoritmik, di mana algoritma media sosial memperkuat dinamika penghukuman dengan memprioritaskan konten yang emosional dan polarisasi. Dalam perspektif kritik, *cancel culture* dipandang sebagai paradoks demokrasi digital. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai alat akuntabilitas bagi kelompok yang terpinggirkan. Namun, di sisi lain, ia mengikis prinsip proses hukum (*due process*) dan nuansa kontekstual (Rini, 2021). Penelitian Tufekci (2017) menunjukkan bagaimana logika biner "baik/buruk" dalam *cancel culture* mencerminkan sifat operasional tertutup yang khas dari sistem autopoietik Luhmannian. Ketika suatu kasus di-*cancel*, sistem cenderung mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan narasi dominan, sekalipun informasi itu relevan(Mardeson & Mardesci, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur untuk mengeksplorasi konsep autopoiesis dari Niklas Luhmann dan kaitannya dengan *cancel culture* sebagai penghukuman sosial dalam dunia digital. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder, termasuk artikel jurnal, publikasi akademik, dan buku yang relevan. Kajian literatur dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai teks yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode interpretatif, di mana teks-teks yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan hubungan antara konsep autopoiesis dan *cancel culture*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami dan memahami makna serta implikasi filosofis dari konsep tersebut melalui analisis teks dan sumber-sumber sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bahwa *cancel culture* menunjukkan karakteristik yang konsisten dengan sistem autopoietik dalam kerangka teori Niklas Luhmann. Fenomena ini berkembang sebagai mekanisme penghukuman sosial yang otonom di dunia digital, dengan kemampuan untuk mempertahankan dan mereproduksi dirinya sendiri melalui operasi komunikasi yang bersifat tertutup dan *self-referential*. Artinya, *cancel culture* tidak hanya merespons stimulus dari luar, tetapi mereproduksi dirinya berdasarkan logika komunikatif internal yang terus berulang.

Dalam teori sistem sosial, Luhmann menekankan bahwa sistem autopoietik beroperasi dengan mereduksi kompleksitas lingkungan. Artinya, sistem tidak dapat menyerap semua

informasi eksternal, melainkan hanya memproses elemen yang relevan dengan kodenya sendiri. Dalam *cancel culture*, hal ini terlihat dari kecenderungan komunitas digital untuk menyederhanakan isu sosial menjadi dikotomi moral seperti "benar/salah" atau "pantas/tidak pantas". Sebagaimana dikemukakan oleh Moeller, sistem sosial membentuk batas melalui eksklusi terhadap apa yang tidak sesuai dengan logika komunikasinya. *Cancel culture* merefleksikan hal ini melalui eksklusi terhadap suara atau narasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai komunitas. Komunitas ini menolak nuansa dan kompleksitas, serta cenderung menyaring informasi berdasarkan konsensus moral internal.

Sistem autopoietik bekerja melalui operasi komunikasi yang tertutup dan berputar di dalam dirinya sendiri. *Cancel culture* merefleksikan sifat ini melalui pengoperasian kode biner "layak untuk diterima / tidak layak untuk diterima," yang tidak merujuk pada hukum, etika universal, atau lembaga formal, melainkan pada dinamika komunikasi internal komunitas daring. Seperti yang dijelaskan oleh Luhmann, setiap sistem sosial mengembangkan kode biner sendiri untuk mempertahankan otonomi. *Cancel culture* menggunakan kode tersebut dalam mengidentifikasi dan menghakimi pelanggaran moral, yang kemudian direproduksi melalui respons digital seperti boikot, kecaman, dan pengucilan. Mardeson (2022) menyebutnya sebagai bentuk "tribunal digital," di mana keputusan moral dibuat berdasarkan sinyal sosial rekursif, bukan prinsip normatif yang mapan.

Meski sistem autopoietik bersifat tertutup, ia tetap terhubung dengan lingkungannya melalui mekanisme structural coupling, yaitu hubungan struktural yang memungkinkan adaptasi terbatas terhadap lingkungan luar. Dalam konteks *cancel culture*, keterhubungan ini terjadi melalui media sosial dan interaksinya dengan sistem lain seperti hukum, politik, dan ekonomi (Sailofsky, 2022). Namun, *cancel culture* hanya menyerap aspek-aspek lingkungan yang mendukung logika internal sistem. Misalnya, permintaan maaf publik atau proses hukum hanya diakui sebagai valid jika sesuai dengan narasi dan norma yang telah terbentuk di dalam komunitas digital. Rasche et al. (2019) menegaskan bahwa structural coupling memungkinkan sistem mengamati lingkungan secara selektif, dan justru memperkuat struktur internal ketimbang mengubahnya Sistem autopoietik terus berjalan melalui reproduksi elemen-elemen komunikatifnya sendiri. Dalam *cancel culture*, ini terjadi melalui siklus identifikasi pelanggaran, penyebaran informasi, respons kolektif, dan pembentukan norma baru yang lebih ketat. Fenomena ini sesuai dengan konsep Luhmann bahwa sistem sosial mempertahankan eksistensinya melalui "operasi yang mereproduksi operasi".

Beer (2017) menjelaskan bahwa algoritma media sosial memperkuat siklus ini melalui pengutamaan konten emosional dan viral, menjadikan *cancel culture* sebagai sistem yang tidak hanya beroperasi mandiri, tetapi juga terus memperluas dirinya melalui teknologi. Berbeda dari sistem hukum yang memiliki prosedur koreksi seperti banding, *cancel culture* tidak memiliki mekanisme formal untuk rehabilitasi. Sekali individu di-*cancel*, proses pemulihan reputasi sangat bergantung pada dinamika komunitas, yang seringkali tidak memberikan ruang rekonsiliasi. Hal ini memperkuat karakter autopoietik cancel culture yang tidak terbuka terhadap refleksi eksternal, dan hanya menilai berdasarkan komunikasi sebelumnya dalam sistem (Rizky Bangun & Kumaralalita, 2022). Seperti dijelaskan Luhmann, sistem autopoietik cenderung tidak mengenali kebenaran di luar logika internalnya. *Cancel culture,* dalam hal ini, memperkuat norma-norma internal dan menolak validitas dari sistem lain, termasuk upaya klarifikasi, pembelaan diri, atau mediasi formal (Ganefi & Hatikasari, 2022).

Temuan ini memperlihatkan bahwa *cancel culture* bukan sekadar respons emosional kolektif, melainkan sistem komunikasi digital dengan logika otonom yang selaras dengan prinsip-prinsip autopoiesis. Cancel culture menunjukkan bagaimana teori sistem sosial Luhmann dapat digunakan untuk membaca dinamika kekuasaan, moralitas, dan eksklusi sosial dalam masyarakat digital kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *cancel culture* dapat dipahami sebagai sistem sosial autopoietik dalam kerangka teori Niklas Luhmann. *Cancel culture* tidak hanya merupakan bentuk respons sosial terhadap perilaku menyimpang di dunia digital, melainkan juga sistem komunikasi yang mandiri dan tertutup secara operasional. Ia mereproduksi dirinya melalui logika komunikasi internal, yakni kode biner "layak/tidak layak", dan tidak bergantung pada norma eksternal seperti hukum atau etika konvensional. Fenomena ini menunjukkan karakteristik utama sistem autopoiesis: reduksi kompleksitas, komunikasi yang self-referential, keterhubungan selektif dengan sistem eksternal (structural coupling), serta ketiadaan mekanisme korektif formal. *Cancel culture* juga memperlihatkan bagaimana algoritma media sosial memperkuat sifat otonom dan siklik dari sistem ini, menjadikannya entitas sosial yang tahan terhadap intervensi eksternal.

IMPLIKASI

1) Studi ini memperkuat relevansi teori sistem sosial Luhmann dalam menganalisis fenomena digital kontemporer, sekaligus menunjukkan bahwa konsep autopoiesis dapat diaplikasikan pada sistem-sistem komunikasi non-tradisional seperti media sosial.
2) Dalam praktik pengembangannya, peran algoritma dalam memperkuat siklus *cancel culture* menunjukkan perlunya desain teknologi digital yang lebih etis dan transparan, agar tidak terus-menerus mereproduksi ketimpangan sosial melalui logika keterlibatan yang ekstrem.

SARAN

1) Penelitian selanjutnya dapat melibatkan **mult**idisipliner dalam moderasi digital**.** Penanganan *cancel culture* tidak cukup dilakukan oleh komunitas digital semata, tetapi juga memerlukan intervensi dari berbagai bidang seperti hukum, psikologi, dan teknologi komunikasi untuk menciptakan mekanisme kontrol sosial yang lebih berimbang dan reflektif.
2) Penelitian lanjutan secara khusus dapat menggunakan pendekatan kritis terhadap informasi digital. Pengguna media sosial perlu membangun kesadaran kritis terhadap mekanisme *cancel culture*, termasuk bagaimana sistem ini menyederhanakan kompleksitas sosial menjadi dikotomi moral yang sempit.

DAFTAR PUSTAKA

Alfredo Kevin. (2023). Analisis Fenomena Cancel Culture dalam Etika "Klik" Manusia di Era Digital Menurut F. Budi Hardiman. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *2*(2), 197–203. https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i2.1930

Ayunda Permata, M., & Nurhadiyanto, L. (2024). *Perspektif Perilaku Doxing Sebagai Bentuk Cancel Culture pada Pengguna Media Sosial X*. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4

Beer, D. (2017). The social power of algorithms. In *Information Communication and Society* (Vol. 20, Issue 1, pp. 1–13). Routledge. https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1216147

Bouvier, G. (2020). Racist call-outs and cancel culture on Twitter: The limitations of the platform's ability to define issues of social justice. *Discourse, Context and Media*, *38*. https://doi.org/10.1016/j.dcm.2020.100431

Chiou, R. (2020). We Need Deeper Understanding About the Neurocognitive Mechanisms of Moral Righteousness in an Era of Online Vigilantism and Cancel Culture. In *AJOB Neuroscience* (Vol. 11, Issue 4, pp. 297–299). Bellwether Publishing, Ltd. https://doi.org/10.1080/21507740.2020.1830872

D. Clark, M. (2020). DRAG THEM: A brief etymology of so-called "cancel culture." *Communication and the Public*, *5*(3–4), 88–92. https://doi.org/10.1177/2057047320961562

Ganefi, G., & Hatikasari, S. (2022). The Impact of Covid-19 Outbreak on Banking Policies in Indonesia. *Jurnal Scientia Indonesia*, *8*(1), 1–36. https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944

Keskin, B. (2018). Van Dijk, Poell, and de Wall, The Platform Society: Public Values in a Connective World (2018). *Markets, Globalization & Development Review*, *03*(03). https://doi.org/10.23860/mgdr-2018-03-03-08

Kurniawan, T., Ngawan, R., Alno, Y., & Herianto, A. (2022). CANCEL CULTURE AND ACADEMIC FREEDOM: A Perspective from Democratic-Deliberative Education Philosophy. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, *6*(1), 1. https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2022.006.01.1

Mardeson, E., & Mardesci, H. (2022). FENOMENA BOIKOT MASSAL (CANCEL CULTURE) DI MEDIA SOSIAL The Phenomenon of Cancel Culture on Social Media. In *JURNAL RISET INDRAGIRI* (Vol. 1).

Marwick, A., & Lewis, R. (2017). *Media Manipulation and Disinformation Online*.

Mueller, T. S. (2021). Blame, then shame? Psychological predictors in cancel culture behavior. *Social Science Journal*. https://doi.org/10.1080/03623319.2021.1949552

Muhammad Reza Zulfikar, Ms., Eka Ari Endrawati, M., & Retno Sari Dewi, M. (2023). *TANTANGAN DALAM MENJAGA KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL*. www.penerbitlitnus.co.id

Norris, P. (2021). Cancel Culture: Myth or Reality? *Political Studies*. https://doi.org/10.1177/00323217211037023

Rasche, A., de Bakker, F. G. A., & Moon, J. (2019). Complete and partial organizing for corporate social responsibility. *Journal of Business Ethics*, *115*(4), 651–663. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1824-x

Rini, R. (2021). *How to Take Offense: Responding to Microaggression*.

Rizky Bangun, C., & Kumaralalita, N. (2022). Kim Seon Ho, You Are Cancelled: The Collective Understanding of Cancel Culture Kim Seon Ho, You Are Cancelled: The Collective Understanding of Cancel Culture ABSTRACT. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *11*, 1–10. https://doi.org/10.33508/jk.v11i1.3785

Sailofsky, D. (2022). Masculinity, cancel culture and woke capitalism: Exploring Twitter response to Brendan Leipsic's leaked conversation. *International Review for the Sociology of Sport*, *57*(5), 734–757. https://doi.org/10.1177/10126902211039768

Saint-Louis, H. (2021). *Understanding cancel culture: Normative and unequal sanctioning*.

Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The Power and Fragility of networked protest*. https://doi.org/10.25969/mediarep/14848